

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih dari pada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik masyarakat.¹

Pilkades merupakan suatu pemilihan untuk memilih pemimpin di daerah secara langsung dan demokratis. Namun, dalam penyelenggaraannya, Pilkades di kotori oleh pelanggaran-pelanggaran, salah satunya yang marak terjadi adalah praktik politik uang (*money politics*). *Money politics* merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkades. *Money politics* adalah segala bentuk pemberian uang dan barang dari kandidat kepada pemilih yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih. Dalam pelaksanaan Pilkades, bentuk dan pola *money politics* yang terjadi sangat beragam dan bervariasi.²

Pemilihan kepala desa merupakan momen politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah yang sudah berpolitik secara

¹ Neneng Yani Yuningsih, "Demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa? Studi kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013", *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, h. 232

² Fuji Hastuti dkk, "*Politik uang dalam PemiluKades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 2012*", Universitas Diponegoro, h.1

langsung dari awalnya.³ Mengenai politik uang hal tersebut paling rawan terjadi saat menjelang pencoblosan atau sebelum satu hari pencoblosan dengan cara mendatangi kerumah masyarakat. Hal ini di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim telah terjadi praktek uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2017 lalu yang di lakukan salah satu calon ataupun tim suksesnya untuk mendapatkan hak suaranya terhadap pemilih tersebut dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk mencuri perhatian masyarakat untuk dapat memilih calon kepala desa yang di inginkan tersebut.

Proses pemilihan kepala desa di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ini sama hal umumnya pemilihan kepala desa atau Pemilu yang lainnya namun akan tetapi pada Pilkades di desa ini menjelang pencoblosan seperti H-3, H-2 dan H-1 telah terjadi *money politics* seperti pemberian berupa uang secara kontan yang di lakukan salah satu calon kepala desa ataupun tim suksesnya sendiri dengan cara mendatangi rumah warga satu dengan yang lainnya ataupun mendatangi perkumpulan masyarakat desa serta sekelompok para pemuda/pemudi seperti karang taruna. Maka dari itu ini merupakan *money politics* yang terjadi ketika ada pemilu ataupun pilkades di desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ini.

Kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang adalah pemberian suara menjelang hari pemilihan hari pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara. Pada saat inilah transaksi dilakukan

³*Ibid, h.233*

baik dengan pemberian uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian *cheque*.⁴

Maka dari itu fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruhnya *money politics* yang terjadi di masyarakat tersebut apakah pilihannya berubah atau tidak. Sehingga dalam penelitian ini sangat menarik di teliti karena proses pemilihan kepala desa tersebut sangat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat yang di sebabkan adanya *money politics* yang di lakukan salah satu calon atau tim suksesnya sendiri. Menariknya dalam penelitian ini ialah persaingan pilkades di desa ini merupakan persaingan pilkades yang lama pada tahun Pilkades 2012, sehingga pada tahun Pilkades 2017 yang lalu kembali bertarung dan juga saling mengalahkan satu sama lain. Sehingga dalam Pilkades di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ini menjadi perbincangan masyarakat dan sangat menarik perhatian masyarakat sekitar. Maka dari itu dalam pilkades ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan dalam pilkades ini.

Mengenai masalah *money politics* yaitu suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi atau partai untuk untuk mempengaruhi suara pemilih. Untuk hal itu larangan mengenai praktik *money politics* memang sudah ada, namun di sisi penegakan hukumnya masih lemah sehingga praktik *money politics* yang di

⁴Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), cet ke-1, h. 67

lakukan calon dan tim suksesnya ini terus berlangsung. Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku memilih menjadi cenderung transaksional (jual beli suara).⁵

Money politics adalah salah satu tindakan penyuapan berupa uang atau orang yang ditukar dengan posisi jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari par pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu, agar dapat terpilih dan menduduki posisi jabatan yang diinginkan. *Money politic* dapat dilakukan oleh individu atau kelompok baik partai atau independen dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik.⁶

Money politik dikaitkan dengan suap menyuap dengan sasaran memenangkan satu kandidat dengan cara apapun termasuk bejalanya *money politic*, perekonomian dan pendidikan cukup sangat berpengaruh tinggi untuk menjalankan suatu *money politic* karenanya masyarakat yang kurang mampu dan pendidikan yang kurang memadai adalah salah satu sasaran bagi sang calon kandidat untuk mengambil hati para masyarakat yang akan memilih calon-calon kandidat tersebut, sehingga masyarakat tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru akan merugikan diri mereka sendiri.

⁵Rahmatiah, "Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa", *Jurnal AL Dawlati*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, h. 272

⁶Hj. Rahmatilah HL, "Money Politic Pada Pemilu Legislatife Tahun 2014 di Kabupaten Gowa", *Jurnal AL Dawlati*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014

Pada dasarnya suap menyuap itu telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut::

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah : 188)

Ada juga hadis tentang suap menyuap, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَسِيَ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad). Hadist ini dinyatakan shohih oleh Syaikh Al-banani di dalam *shohih At-tarhib wa At-Tarhib*1/261 no.2212.

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an dan Hadis diatas bahwa *money politics* atau suap menyuap dalam pemilu, pilkada maupun pilkades sangatlah tidak boleh dan haram hukumnya. Dari segi pengetahuan tentang suap menyuap masyarakat sudah tau hukumnya tidak boleh dan haram akan tetapi masyarakat kebanyakan hanyalah mengabaikan saja tentang pandangan dalam islam mengenai suap menyuap demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa *money politics* sangatlah marak terjadi dalam pelaksanaan pilkades sehingga kegiatan demokrasi ini sering terganggu dengan adanya aksi *money politics*. Melihat fenomena tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti praktiknya *money politics* pada Pilkades serentak di Kabupaten Muara Enim khususnya di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang pada tahun 2017.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam batasan masalah ini yaitu memperjelas masalah penelitian yang akan di teliti. Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang maka penelitian ini membatasi permasalahan objek yang akan teliti yaitu, apa yang membelatar belakangi terjadinya *money politics* pada Pilkades di Desa Teluk Limau tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Sehingga masalah pada penelitian ini lebih jelas dan tidak menyimpang dalam masalah penelitian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh *money politics* terhadap pilihan masyarakat di Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim pada Pilkades serentak tahun 2017 ?

- b. Faktor apa yang mempengaruhi *money politics* terhadap pilihan masyarakat di Desa Teluk Limau Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim Pada Pilkada serentak tahun 2017 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi bagaimana pengaruhnya *money politics* pada pilihan masyarakat tersebut.
- b. Mengidentifikasi apa faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap Pilkada dengan adanya *money politics*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat bermanfaat secara Teoritis dan Praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian sumber ilmu pengetahuan dan memberikan penjelasan terhadap peneliti maupun masyarakat terhadap mengenai *money politics* ini.

b. Manfaat secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka di harapkan dapat memberikan manfaat atau masukan terhadap masyarakat agar tidak terpengaruh dengan adanya sejumlah uang yang berikan orang khususnya para kandidat calon maupun tim suksesnya sehingga membuat masyarakat mempengaruhi

pilihannya. Pilihlah sesuai hati nurani jangan karena ada uang merubah pilihan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu hal yang memuat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan maksud menghindari duplikasi, di samping itu untuk menunjukkan bahwa topik yang di teliti belum pernah di teliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang di lakukan oleh yang bersangkutan. Berkaitan dengan penelitian saya yang bertema dengan *money politics* ini akan melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Dari penelitian Fitriyah, *Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)*, Menjelaskan bagaimana kerja praktik politik uang dalam pilkada secara langsung menunjukkan kecenderungan makin menguat sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah lembaga survey. Topo santoso memberi penjelasan mengenai apa-apa saja yang masuk kategori politik uang, menurutnya biasanya *money politic* dikaitkan dengan masalah suap-menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat dalam pemilihan. Padahal sebenarnya jika dilihat secara lebih luas *money politic* dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana didalam konteks politik (termasuk masalah kerpartaian dan pemilu) .⁷

⁷. Fitriyah, "Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)", *Jurnal Politika*, Vol, 6 . No. 2 Oktober 2015

Selanjutnya dari penelitian H. Rahmatiah HL. , dari jurnalnya yang berjudul “*Money Politics* Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa” mengatakan bahwa faktor penyebab masyarakat menerima *money politics* di sebabkan karena faktor ekonomi dan merubah pikiran dalam memilih akan tetapi masyarakat kabupaten Gowa ini di kategorikan cerdas dalam menentukan pilihan masih logis dan menggunakan nalar akibat dari berkembangnya media dan informasi yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat yang menghasilkan pemerintahan menjadi yang demokratis.⁸

Kemudian dari penelitian Dendy Lukmajati, dari jurnalnya yang berjudul “Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Kabupaten Blora) mengatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat indikasi pola perilaku caleg yang di klasifikasikan kearah atau bentuk politik uang. Selain itu juga ada transaksi pemberian barang atau uang secara langsung sehingga masyarakat sudah marak sekali dengan adanya praktik politik uang dalam pilkada ini. Hal ini terjadi karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang di kabupaten Blora di pengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah dan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang masih minim.⁹

Dari penelitian Anaz Azwar, dari jurnalnya yang berjudul “Kiai, *Money Politics* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi

⁸Hj. Rahmatiah HL, “Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Dawlati*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, h. 271

⁹Dendy Lukmajati, *Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)*. Jurnal Politika, Vol. 07, No. 01, April 2016. hal. 1

Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013” dalam penelitiannya mengatakan bahwa seorang kiai bernama SY mencalonkan dalam pilkades dan melakukan praktik uang dalam hal memenangkan pilkades ini. Dalam menjalankan aksinya SY tidak terjun kelapangan melainkan tim suksesnya yang beraksi. Selain itu juga dalam pilkades di desa Plosorejo ini sudah terjadi sejak dulu, dan praktik politik uang ini sudah menjadi budaya tersendiri. Dalam menjalankan aksinya SY tidak terjun kelapangan melainkan tim suksesnya yang beraksi. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegak hukum yang berwenang terhadap *money politics* yang terjadi.¹⁰

Sedangkan dari penelitian Zuly Qodir, dari jurnalnya yang berjudul “Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya” mengatakan bahwa dalam modus praktik politik uang yaitu Caleg membuat strategi bersama tim suksesnya untuk dapat mempengaruhi masyarakat seperti mengadakan bersosialisasi dengan memberikan berupa barang, hadiah dan doprize, pakaian dan bahan makanan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, mie instan dan lain-lain. Dengan melakukan cara modus ini Caleg beserta tim suksesnya menargetkan hak suaranya yang lebih terhadap masyarakat.¹¹

Dari penelitian Fuji Hastuti dkk, *Politik uang dalam PelKades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 2012*, politik uang yang terjadi sangat tinggi. Hal ini terjadi karena politik uang telah menjadi budaya masyarakat

¹⁰Anaz Anwar, Kiai, Money Politics dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah: studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 05, No. 02, Mei 2016. Hal. 227

¹¹Zuly Qodir, “Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume VIII, Edisi 2.

Desa Cangkring dan Desa Dawuhan. Budaya politik uang tidak lepas dari faktor kemiskinan, mentalitas, dan kultur yang melihat politik sebagai sarana untuk hal-hal yang sifatnya materialistik. Adanya slogan “laka duit laka acara nyoblos” yang dapat di artikan “tidak ada uang, berarti tidak mencoblos”. Hal ini menunjukkan bahwa peran politik uang di Pemilukades berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan. Bentuk maupun pola politik uang yang terjadi dalam Pemilukades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan sangat bervariasi dan beragam.¹²

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati¹² “*Politik Uang di Indonesia (Patronase dan Klientelisme pada pemilu legislative 2014)*” Tulisan ini memberkan contoh tentang bejalanya politik uang menurutnya pengaruh fitur pasangan calon dan visi misi hanya sebgaiian masyarakat mempertimbangan hal itu sering kali masyarakat mempertimbangkan pemberian-pemberian pribadi untuk mendukung upaya pembelian suara yang sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika memalukan kunjungan kerumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagi perekat hubungan sosial, anggapan bahwa kadang pemberian sebagai kenang-kenangan. pemeberian yang paling umum bias dibedakan dalam beberapa katageori. sebagai contoh, pemeberian dalam bentuk benda-benda kecil (misalnya, kalender dan gantungan kunci) yang disertai nama kandidat dan imej yang dibentuk untuk sang kandidat. contoh barang pemberian lain adalah bahan

¹²Fuji Hastuti dkk, “*Politik uang dalam PemiluKades Desa Cangkring dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 2012*”, Universitas Diponegoro.

makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan mie instan, juga benda benda kecil lainnya. diluar itu, masih banyak lagi jenis barang murah kecil-kecil lainnya yang biasa diberikan.¹³

Dilihat dari tinjauan pustaka diatas yang menjadi perbedaan sebelumnya, yaitu waktu dan tempat penelitian, rumusan masalah yang diambil, hasil penelitian secara menyeluruh, pengaruh *money politics* yang terjadi dimasyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Oleh sebab itulah peneliti ini terlihat sangat berbeda dari penelitian yang sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Studi ini hendak melihat bagaimana pengaruh *money politics* terhadap pilihan masyarakat dalam mengarahkan perilaku memilih pada Pilkada di desa Teluk Limau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim pada tahun 2017. Selain itu, di butuhkan teori-teori yang relevan yang akan di teliti, adapun penelitian ini menggunakan dua teori yaitu, teori Patronase dan Klientelisme.

1. Patronase

Penelitian ini akan melihat bagaimana berbagai bentuk relasi yang kerap terjadi di ranah politik lokal pada bentuk politik patronase dan klientilisme. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Aspinall dan Sukmajati dalam menjelaskan bagaimana pemilu legislatif dan pilpres pada 2014, mereka melihat bahwa ada hubungan timbal-balik antara patronase dan kecurangan pemilu. Patronase

¹³. Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati, *Politik uang di Indonesia, Partonase dan Klientalisme pada Pemilu Legislative 2014*, (Yogyakarta : PolGov, 2015)

merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung¹⁴.

Dalam konteks politik lokal terutama untuk kepentingan pemilihan, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi berupa bantuan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok/komunitas. Dapat juga berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dana-dana publik milik pemerintah yang pendistribusiannya dilakukan dengan tujuan mendapat dukungan untuk pejabat pemberi bantuan. Bentuk-bentuk patronase mencakup lima bentuk yaitu, pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*).

Pembelian suara (*Vote buying*) adalah distribusi sistematis pembayaran tunai dari calon ke pemilih dalam beberapa hari setelah pemilu disertai dengan harapan implisit bahwa penerima akan merespon dengan memilih pemberi. Dalam praktiknya, tindakan patronase yang diklasifikasikan berdasarkan pembelian suara oleh kandidat-kandidat ini biasanya dilakukan secara sistematis dengan menggunakan jaringan mobilisasi, atau juga dapat dianggap sebagai cara yang

¹⁴Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati, *Politik uang di Indonesia, Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta : polgov, 2015), h. 4

berguna untuk merekam pemilih dan kemudian mendistribusikan uang / barang kepada pemilih¹⁵.

Pemberian-pemberian pribadi (*Individual gifts*) biasanya merupakan praktik patronase yang dilakukan untuk mendukung praktik pembelian yang sehat agar lebih sistematis. Ini dilakukan dengan memberikan bentuk-bentuk hadiah tertentu secara pribadi. Hadiah pribadi ini sering digambarkan sebagai hubungan sosial yang mengkilap seperti pemberian hadiah pribadi seperti souvenir atau bingkisan. Klasifikasi praktik penyediaan barang-barang pribadi sebenarnya sangat sulit dibedakan dari praktik pembelian suara. Oleh karena itu, menurut Aspinall dan Sukmajati, praktik pemberian barang pribadi dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu memberi dalam bentuk benda-benda kecil (seperti kalender dan gantungan kunci), bahan makanan, dan benda-benda kecil lainnya yang memiliki makna keagamaan (seperti kain, peralatan rumah tangga, hijab, mukenas, dan sajadah). Selanjutnya, selain pembelian suara dan hibah pribadi, bentuk patronase ini juga dapat berupa layanan dan kegiatan.¹⁶

Pelayanan dan aktivitas (*Services and activities*) adalah bentuk praktik patronase dengan menyediakan atau membiayai berbagai bentuk kegiatan dan layanan bagi pemilih. Secara umum, bentuk kegiatan yang paling sering dilakukan oleh kandidat atau politisi partai adalah berkampanye selama upacara komunitas tertentu. Contoh lain dari acara olah raga ini, turnamen catur atau dominos, forum

¹⁵*Ibid, h. 24*

¹⁶*Ibid, h. 25*

pengajian, demonstrasi memasak, nyanyian kelompok, pesta yang diselenggarakan oleh komunitas.¹⁷

Barang-barang kelompok (*Club goods*) adalah praktik patronase yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi sekelompok orang atau kelompok sosial tertentu, bukan hanya manfaat individu. *Club goods* dalam praktek di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori: organisasi untuk asosiasi masyarakat dan sumbangan untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, pedesaan, atau lingkungan lain.¹⁸

Proyek-proyek gentong babi (*Pork barrel projects*) adalah salah satu bentuk dari politik distributif, di mana politisi (baik lembaga legislatif maupun eksekutif) berusaha untuk mengalokasikan sumber daya material dari negara kepada pendukungnya dalam kerangka mobilisasi dukungan elektoral. Tidak hanya bantuan langsung, bentuknya dapat berupa kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum di kabupaten/kota dari pejabat terpilih. Proyek-proyek perbaikan fasilitas publik tersebut sering dijadikan contoh klasik *pork barrel* yang disitir dalam banyak literatur kajian politik *pork barrel projects*. Hal ini bukan berarti bahwa *pork barrel projects* hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi *pork barrel projects* juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, h. 26

¹⁸ *Ibid*, h. 27

¹⁹ *Ibid*, h. 28

2. Klientelisme

Klientelisme menggambarkan hubungan klientelistik dalam bentuk jaringan makelar suara yang umum digunakan di Indonesia, di mana bentuk jaringan broker dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan politik uang. Bentuk jaringan broker suara dalam kasus ini termasuk tiga bentuk jaringan yakni tim sukses, mesin jejaring sosial, dan partai politik.

Tim sukses, adalah jaringan makelar politik yang umum digunakan, dan biasanya dibungkus dengan istilah tim pemenangan. Secara umum tim sukses biasanya dipersonalisasi dan mempromosikan kampanye untuk calon individu, meskipun seringkali tim sukses juga bekerja untuk sejumlah kandidat dalam bentuk kampanye tandem (Aspinall dan Sukmajati, 2015). Masalah yang sering terjadi di tim sukses yang menciptakan masalah timbal balik yang harus diatasi melalui penggunaan tim sukses adalah penggelapan, kelambanan, dan penipuan. Oleh karena itu, biasanya, politisi atau kandidat dalam pemilihan sangat peduli dengan masalah ini. Terlepas dari jaringan broker dalam bentuk tim sukses, ada juga jaringan makelar perantara dalam bentuk mesin jejaring sosial.²⁰

Mesin-mesin jaringan sosial dalam tinjauan yang disediakan oleh Aspinall dan Sukmajati lebih seperti pemimpin komunitas yang berpengaruh. Tidak jarang tokoh-tokoh masyarakat ini memiliki posisi formal di pemerintahan seperti kepala desa dan ketua RT / RW, dan mereka juga dapat menjadi ketua asosiasi formal dalam bentuk kelompok etnis, klub, termasuk klub olahraga, dan bahkan

²⁰Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati, *Politik uang di Indonesia, Partonase dan Klientalisme pada Pemilu Legislative 2014*, (Yogyakarta : polgov, 2015), h. 35

kelompok agama. Pemanfaatan tokoh masyarakat sebagai mesin jejaring sosial dilakukan oleh kandidat dengan harapan bahwa pengikut tokoh-tokoh ini dapat didorong untuk mendukungnya. Struktur broker menggunakan setidaknya dua rute yang berbeda untuk mencapai pemilih, yaitu melalui Tim Sukses (atau politik pesta) terorganisir secara teritorial dan melalui jejaring sosial. Seiring dengan dua bentuk jaringan broker yang telah dijelaskan di atas, jaringan broker terakhir adalah partai politik.²¹

Partai politik adalah jaringan pialang yang memainkan peran terkecil dalam mengorganisir kampanye di akar rumput untuk mendukung kandidat. Partai politik biasanya digunakan oleh kandidat yang menjadi anggota partai. Partai politik dapat menjadi jaringan mobilisasi mobil yang paling minimal dan akan menjadi efektif ketika didasarkan pada kandidat yang berasal dari pejabat partai daripada kader yang bukan administrator partai. Penggunaan kader partai politik untuk memobilisasi suara untuk salah satu kandidat yang biasanya adalah para administrator atau bahkan ketua partai di tingkat lokal dan pusat harus menjadi kerugian bagi kandidat lain dari partai yang sama yang juga bersaing.²²

²¹*Ibid, h. 38*

²²*Ibid, h. 39*

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid.²³ Setelah melalui serangkaian proses data - data tersebut diharapkan dapat membawa solusi untuk memecahkan masalah dan problematika yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif atau disebut juga penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu pendekatan yang terkait dengan teknik-teknik survei sosial, seperti, wawancara, kuesioner, analisis statistik, dan lain sebagainya. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Metode kuantitatif disebut sebagai metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini juga disebut metode kuantitatif kerana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.²⁵

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 4..

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; PT Asdi Mahasatya 2010), hlm. 20.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 7.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Sumatera Selatan. Alasan peneliti memilih Desa ini karena peneliti melihat isu kuatnya pengaruh *money politics* pada pilihan masyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini seperti buku, literatur, dan referensi lainnya. Sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dengan cara membagikan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat Desa Teluk Limau 17 tahun keatas, kepada responden terpilih yang mewakili populasi. Kuisisioner dilakukan secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah disusun dan masing-masing pertanyaan telah tersedia jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah tersedia.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di instansi tersebut. data ini berupa gambaran umum,

misalnya Literatur - literatur, buku, koran, majalah dan di dapat dari dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Limau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁸ Setelah populasi dirumuskan, lalu selanjutnya menetapkan sampel penelitian, pengambilan sampel dimaksudkan untuk mewakili populasi. Untuk menentukan jumlah sampel, bahwa ukuran sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot a^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 75.

²⁷*Ibid.*, hlm. 90.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya 2010), hlm. 173.

e = Batas toleransi kesalahan (eror tolerance) yang diinginkan, yaitu sebesar 10% (0,10) dengan tingkat kepercayaan 90%.²⁹

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masyarakat Desa Teluk Limau adalah 1.328 pemilih, maka sampel yang diambil:

$$n = \frac{1,328}{1+(1.328 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{1.328}{1+13,28}$$

$$n = \frac{1.328}{14,28}$$

n = 92,99 dibulatkan menjadi 93

Berdasarkan hasil dari penentuan sampel diatas maka sampel yang dibutuhkan sebanyak 93 orang responden.

5. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan suatu cara pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu random sampling yaitu random sampling atau sampel acak. Random sampling adalah pengambilan anggota anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi³⁰. Populasi didalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Limau. keseluruhan populasi dapat dijadikan sampel dalam penelitian

²⁹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group 2013, hlm. 34.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.75.

karena seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama tanpa melihat faktor-faktor tertentu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner), observasi, dan dokumentasi.³¹

a. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet, agar kuesioner dijawab dan diisi oleh responden.³²

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya 2010), hlm. 265.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*, hlm. 162.

7. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Perumusan masalah dan pemilihan sampel yang tepat belum tentu akan memberikan hasil yang benar, apabila peneliti memilih teknik yang tidak sesuai dengan data yang tidak valid dan reliabel akan memberikan hasil yang berlawanan atau bertentangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.³³

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik, yaitu statistik deskriptif. Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling Teknik Analisis Kuantitatif dua hubungan, menguji hipotesis atau melakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Biasanya teknik statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain, Penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang (cross tab).

³³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan*. (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 255.

Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang atau tinggi. Penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogive, diagram. Batang, diagram lingkaran, diagram pastel (pie chart), dan diagram lambang. Penghitungan ukuran tendensi sentral (mean, median modus). Penghitungan ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil). Penghitungan ukuran penyebaran (standar deviasi, varians, range, deviasi, kuartil, mean deviasi, dan sebagainya).³⁴

³⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998), hlm. 27.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, maka sistematika penulisan ini terdiri dari Empat Bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian. dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Bab ini memaparkan gambaran umum tentang masyarakat Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang menjadi fokus tujuan dalam penelitian.

BAB III: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA Bab ini akan membahas dan menjelaskan apa itu money politic, apa saja bentuk-bentuk money politic, bagaimana pengaruhnya money pilitics terhadap pilihan masyarakat dan bagaimana strategi para kandidat dalam mendapatkan hak suara dari masyarakat tersebut.

BAB IV: PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup dari berbagai sub bab yang membuat kesimpulan dan saran